



**Buruh Minta UMK Rp2,5 Juta**

**Pemkot Tak Gunakan KHL untuk UMK**

**YOGYA, TRIBUN** - Kota Yogyakarta akan menggunakan standar penghitungan nasional dalam usulan angka Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta. Menurut Rihari Wulandari, Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam besaran yang sama untuk seluruh Indonesia.

**ANTARA UMK DAN KHL**

- Pemkot mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Hasil Survei ABY, KHL Kota Yogyakarta Rp2,5 juta -Rp2,6 juta.
- UMK Kota Yogyakarta 2017 ditetapkan Rp1.572.200 per bulan
- Kamis (25/10) dibahas di tingkat DIY bersama Gubernur.

**Buruh Minta UMK Rp2,5 Juta**  
 ● Sambungan Hal 13

"Dua aspek tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan besaran UMK yang mengacu pada PP Nomor 78/2015 tentang pengupahan. Tidak ada pertimbangan komponen lain, termasuk hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," tutur Rihari.

Sejak diterapkan untuk menghitung UMK pada 2016, nilai UMK di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada 2016, UMK ditetapkan sebesar Rp1.452.400 per bulan, sedangkan UMK 2017 ditetapkan Rp1.572.200 per bulan atau mengalami kenaikan Rp119.800.

Ia menuturkan, banyak masukan terkait penyusunan usulan UMK agar disesuaikan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan standar pusat.

"Bagi daerah dengan in-

nasional, maka nilai UMK yang ditetapkan bisa lebih kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah," jelasnya.

Sementara itu, Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menolak pengukuran besaran Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. ABY berpedoman, penentuan UMK harus mengacu pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kami dari ABY tetap berpedoman bahwa penetapan UMK harus berdasarkan kebutuhan hidup layak," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjend) ABY, Kirmadi.

Ia menjelaskan, untuk menentukan UMK harus berdasarkan kondisi atau survei di pasar. Menurutnya, ABY melakukan survei langsung untuk menentukan KHL Kota Yogyakarta. Dari survey tersebut, KHL Kota Yogyakarta sebesar Rp2.500.000 hingga Rp2.600.000 per bulan.

**Dibahas Gubernur**

Haryadi Suyuti memastikan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta tahun depan mengalami kenaikan. Angka pastinya akan ditumunkan usai pembicaraan di tingkat provinsi pada Kamis (24/10).

"Besok 26 Oktober kita baru ditundang oleh Gubernur, setelah itu saja baru disebut angkanya. Tapi pasti ada kenaikan," ujar Haryadi, Selasa (24/10).

Ia menjelaskan, usulan UMK ini akan dibicarakan juga dengan pemerintah daerah (kabupaten) lainnya. Angka di Kota Yogyakarta nanti disesuaikan dalam pembicaraan bersama, sehingga tidak ada ketimpangan. "Saya enggak berani sebut angka karena biar tidak mendahului yang lain," sebutnya.

Terkait masukan dari para buruh dan pengusaha, Haryadi memastikan angka usulan UMK sudah berdasarkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bila ada yang masih dipermasalahkan, maka buruh dan pengusaha bisa membahasnya

*Handwritten notes:*  
 - Din. Kop. UKM, Naker & rans  
 - Netral  
 - Biasa  
 - Untuk diketahui  
 - Ditanggapi  
 - Diketahui  
 - Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005